

Judul : Pagu Indikatif 2019 : Pemerintah Perketat Anggaran Belanja
Tanggal : Kamis, 05 Juli 2018
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 4

Pemerintah Perketat Anggaran Belanja

JAKARTA — Pemerintah akan lebih ketat dalam penganggaran belanja kementerian dan lembaga pada tahun depan dalam rangka efisiensi belanja negara.

Edi Suwiknyo
 edi.suwiknyo@bisnis.com

Sejumlah anggaran kementerian dan lembaga dengan belanja terbesar tercatat mengalami penyusutan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, jika pada tahun ini anggarannya sebesar Rp107,4 triliun, pada tahun depan turun sebesar Rp5,4 triliun menjadi hanya Rp102 triliun.

Sementara itu, anggaran Kementerian Pertahanan, dalam pagu anggaran indikator itu mengalami penurunan sebesar Rp1,6 triliun atau dari Rp107,7 triliun menjadi Rp106,1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengakui bahwa pada tahun depan, pemerintah lebih mengutamakan untuk melakukan efisiensi. Efisiensi dalam hal ini bukan berarti tidak optimal, justru kebijakan ini dimaksudkan supaya kementerian dan lembaga bisa lebih efektif menggunakan anggaran.

"Pagu ini adalah pagu awal, yang tentunya nanti akan kami lakukan penghitungan lagi untuk menentukan pagu tahun 2019, bisa saja nanti akan berubah," kata Askolani di Badan Anggaran DPR, Rabu (4/7).

Askolani menambahkan, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah akan menyasar ke belanja barang yang sifatnya rutin, tetapi tidak menutup kemungkinan otoritas fiskal juga akan mengevaluasi dan mengawasi belanja yang sifatnya produktif.

Belanja infrastruktur atau bahan baku modal yang menopang sejumlah proyek besar milik pemerintah misalnya, kendati belum diputuskan, tetapi pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian PUPR.

"Tentunya langkah itu yang akan dilakukan terlebih dahulu, [efisiensi] ini akan mengarah ke belanja barang, belanja modal kalau diperlukan naik akan naik dengan batas-batas yang wajar," ungkapnya.

Mengutip data dari Kementerian Keuangan, penyusunan belanja kementerian dan lembaga mempertimbangkan realisasi 2017 dan outlook tahun 2018. Pagu anggaran

► Efisiensi yang dilakukan pemerintah akan menyasar ke belanja barang yang sifatnya rutin.

indikatif tahun 2019 dirancang sebesar Rp838,6 triliun atau turun dibandingkan dengan APBN 2018 yang mencapai Rp847,4 triliun.

BELANJA SOSIAL

Meski dua kementerian utama yakni Kementerian Pertahanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatatkan penurunan anggaran, tetapi khusus Kementerian Sosial, mengulang tahun lalu, anggarannya justru dirancang lebih besar lagi yakni dari Rp41,3 triliun menjadi Rp59,3 triliun atau naik sebesar Rp18 triliun.

Eric Alexander Sugandi, pengamat ekonomi Asia Development Bank (ADB) Institute, menilai kebijakan efisiensi belanja negara yang akan diterapkan tahun depan harus bisa memastikan anggaran yang dibelanjakan tepat sasaran.

Dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi tersebut memang searah dengan keinginan pemerintah untuk menurunkan defisit APBN tahun depan.

"Pemerintah berupaya untuk menggenjot penerimaan, tetapi penerimaan juga dipengaruhi faktor-faktor eksternal yang di luar kendali pemerintah, misalnya harga

minyak," kata Eric, Rabu (4/7).

Selain itu, menurutnya, peningkatan efisiensi anggaran memang perlu dilakukan agar alokasi belanja benar-benar tepat sasaran, tidak berlebih, dan tidak salah beli barang. Misalnya, menghindari barang berkualitas buruk dan tepat besarannya (hindari pembelian dengan *mark up*).

"Saya lihat efisiensi belanja memang sudah seharusnya dilakukan. Pemerintah juga mesti mengutamakan pembelian barang-barang sifatnya *durable* dan tidak mudah rusak," jelasnya.

Terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah belum berencana melakukan efisiensi anggaran khususnya untuk belanja impor. Kebijakan belanja 2018 tetap akan dilakukan sesuai dengan rancangan semula, yakni mengoptimalkan belanja yang sudah dialokasikan dalam APBN 2018.

Askolani mengatakan, optimalisasi belanja sebenarnya bisa ditunjukkan dengan tren penyerapan belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, efisiensi di internal kementerian juga menopang langkah optimalisasi tersebut.

"Di Kementerian Keuangan, efisiensi internal bisa jadi contoh, harusnya bisa dilakukan di semua kementerian dan lembaga," kata Askolani.

Meski mengklaim optimalisasi belanja telah berjalan cukup baik, tetapi berdasarkan data Kemenkeu realisasi belanja per akhir Mei senilai Rp458 triliun, sebagian besar masih didominasi oleh belanja yang sifatnya tak produktif. Porsi paling dominan adalah untuk pembayaran bunga utang senilai Rp112,48 triliun tumbuh 13,77%, belanja barang senilai Rp84,89 triliun tumbuh hampir 22%, dan bantuan sosial senilai Rp39,25 triliun atau naik 93,2%. ■

Alokasi Belanja Negara dalam APBN (Rp Triliun)

Sumber:
Kementerian
Keuangan
Ket: "pagu
indikatif
BISNIS/HUSIN
PARAPAT



Tahun	Belanja K/L	Infrastruktur	Pendidikan	Kesehatan	Perlindungan Sosial
2015	732,1	256,1	408,5	65,9	49,6
2016	684,4	269,1	416,6	91,4	47,3
2017	765,1	379,7	426,7	92,4	54,1
2018	874,4	410,4	444,1	111	78,5
2019*	838,6				